

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TINGKAT
INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

WIRATNO BAGUS SURYONO

NIM.C2B604136

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Wiratno Bagus Suryono

NIM : C2B604165

Fakultas/jurusan : Ekonomi/IESP

Judul skripsi : **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja
terhadap PDRB Jawa Tengah.**

Dosen Pembimbing : Drs.Nugroho, SBM, MSP

Semarang, September 2010

Dosen Pembimbing

Drs. Nugroho, SBM, MSP

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Wiratno Bagus Suryono

Nomor Induk Mahasiswa : C2B604165

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah”.**

Telah dinyatakan Lulus pada Tanggal

TimPenguji :

1. Drs. Nugroho SBM, MSP

(.....)

2. Dr. Hadi Sasana M.Si

(.....)

3. Evi Yulia P. SE. MSi

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Wiratno Bagus Suryono, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TINGKAT INVESTASI, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB JAWA TENGAH. Adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin,tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa membrikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Semarang September2010

Yang membuat Pernyataan

(Wiratno Bagus Suryono)

NIM. C2B604165

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- “Lebih baik dasingkan daripada menyerah pada kemunafikan” Soe Hoek Gie
- Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga” (H.R. Muslim)”.
- Ubahlah cara berpikir anda maka anda akan berubah.

PERSEMBAHAN :

- Ayah dan Ibu selaku Orang tua saya yang selalu mendukung dan mendo’akan saya.
- Teman-teman game Guild Fiesta bellato Lunar.
- Teman-teman IESP angkatan 2004 (khususnya donna dan Sabil) yang telah mendukung saya dalam mengerjakan Skripsi ini.
- Teman-teman di Jazz net yang menemani saya main 3 tahun ini.

ABSTRAKSI

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Dimana Tingkat PDRB dapat menggambarkan pertumbuhan Ekonomi suatu wilayah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Propinsi Jawa Tengah adalah propinsi yg memiliki PDRB paling rendah di pulau jawa dibandingkan propinsi-propinsi yg lain dimana secara dominan sumber penerimaan PDRB jawa tengah dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu PAD, Tingkat Investasi, dan Tenaga kerja maka dari itu Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, Tingkat Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Jawa Tengah.

Metode Penelitian menggunakan Analisis regresi berganda dengan menggunakan data rentang waktu 15 tahun mulai tahun 1994 hingga 2008. Hasil analisa data menunjukkan bahwa model penelitian ini lolos uji asumsi klasik dengan *R-square* model sebesar 0,958. PAD, Tingkat Investasi, Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap PDRB Jawa tengah. Koefisien PAD sebesar 0,812. Adanya pengaruh yg positif antara Tingkat Investasi dengan PDRB Jawa Tengah berdasarkan hasil regresi dapat dilihat koefisien tingkat investasi 0,036. Adanya pengaruh yg positif antara Tenaga Kerja dengan PDRB Jawa Tengah berdasarkan hasil regresi dapat dilihat koefisien 0,924 Tenaga Kerja.

Kata kunci : PDRB, PAD, Tingkat Investasi, Tenaga Kerja

]

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hikayahnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TINGKAT INVESTASI, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB JAWA TENGAH “ Penulis selesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh PAD, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi. Selama mengerjakan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr HM Chabachib, M Si, Akt Slaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
2. Bapak Drs. Nugroho SBM, MSP selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan bibingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Achma Hendra Setiawan, SE, MSi selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan dan pengarahan selama studi kepada penulis.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna kepada penulis

5. Seluruh staff administrasi dan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu selama proses belajar dan penyelesaian skripsi.
6. Petugas BPS Semarang dan instansi-instansi terkait yang telah memberikan bantuan informasi dan dukungan kepada penulis
7. Keluarga yang telah memberikan motivasi dan Doa nya, mudah-mudahan penulis dapat memberi kebahagiaan kepada mereka.
8. Sahabat-sahabat IESP 2004 yang selalu memberikan dukungan yang besar kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat Rf (guild fiesta) dan Jazz net yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Akhirnya karena keterbatasan penulis dalam pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pihak yang berkepentingan.

Semarang September 2010

Penulis

WiratnoBagusSuryono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat dan Kegunaan penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	13

2.1.1 Fungsi Produksi	13
2.1.2 Fungsi Produksi Cobb-Douglas	17
2.1.3 Definisi Pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan ekonomi	18
2.1.4 Model Pertumbuhan Ekonomi	22
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto	25
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah PAD	27
2.1.7 Tingkat Investasi	34
2.1.8 Tenaga Kerja	35
2.2. Penelitian Terdahulu.	37
2.3. Kerangka Pemikiran	39
2.4 Hipotesis	40

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Variabel Penelitian	42
3.2.1 Variabel bebas (<i>Independent Variables</i>)	42
3.2.2 Variabel terikat/tergantung (<i>dependent variables</i>)	44
3.3 Metode Pengumpulan Data	44
3.4 Metode Analisis Data	44
3.5 Pengujian Hipotesis	45
3.6 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik	47
3.6.1 Uji Normalitas	49
3.6.2 Uji Multikolinieritas	49
3.6.3 Uji Autokorelasi	50
3.6.4 Uji Heterokodastisitas	52

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	53
4.1.1 Keadaan Geografis Jawa Tengah	53
4.1.2 PDRB Jawa Tengah	55
4.1.3 Pendapatan Perkapita	57
4.1.4 Tingkat Investasi	59
4.1.5 Pendapatan Asli Daerah	60
4.1.6 Tenaga Kerja	63
4.2 Analisis Data	64
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik	64
4.2.2 Analisi Regresi	68
4.2.3 Pengujian Hipotesis	69
4.2.3.1 Uji Varian atau bersama-sama (Uji F)	69
4.2.3.2 Uji Parsial (Uji T)	71
4.2.3.3 Koefisien Determinasi	71
4.3 Interpretasi Hasil	72
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto	
Propinsi Jawa Tengah 2004-2008.....	4
Tabel 1.2 PDRB atas dasar Harga Konstan 2000	
Propinsi Dipulau Jawa tahun 2007-2008.....	5
Tabel 1.3 Komposisi Penerimaan Daerah	
Jawa Tengah 2004-2008.....	6
Tabel 1.4 Perkembangan Investasi Swasta di Propinsi Jawa Tengah	7
Tabel 1.5 Angkatan Kerja di propinsi Jawa Tengah.....	8
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar	
Harga Konstan 2000 menurut lapangan usaha di Jawa Tengah	
Tahun 2004-2008 (Persen)	56
Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto	
Propinsi Jawa Tengah 2004-2008	57
Tabel 4.3 Pendapatan Regional Perkapita Propinsi Jawa Tengah	
Tahun 2004-2008	58
Tabel 4.4 Perkembangan Investasi Swasta Di Jawa Tengah	
tahun 2004-2008	60
Tabel 4.5 Realisasi PAD dan Bagi hasil Propinsi Jawa tengah tahun anggaran	
Tahun 2004-2008.....	62

Tabel 4.6 Angkatan Kerja yang bekerja menurut status pekerjaan utama	
Di tahun 2004-2008	64
Tabel 4.7 Rangkuman nilai Tolerance dan VIF	65
Tabel 4.8 Hasil Uji heteroskedatisitas	66
Tabel 4.9 Uji autokorelasi	67
Tabel 4.10 Hasil Estimasi	68
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial berdasar Uji t pada Persamaan	
linear berganda	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Produksi.....	13
Gambar 2.2	Grafik Produksi dengan satu variabel input.....	15
Gambar 2.3	Peta Kurva Produksi sama untuk Fungsi dengan Nilai $s=1$	17
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.1	Uji Normalitas	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Tabel data Olahan	80
Lampiran 2	: Model OLS atau Analisis Regresi	81
Lampiran 3	: Uji Asumsi Klasik	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah proses mengubah struktur ekonomi yang belum berkembang dengan jalan *capital investment* dan *human investment* yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk atau *income per capita* naik (Hasibuan, 1987: 12). Menurut Suparmoko, pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (2002: 5). Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, yaitu :

- a. Suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus.
- b. Suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per jiwa/*income per capita*.
- c. Kenaikan *income per capita* itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa (Hasibuan, 1987: 12).

Pemberlakuan Undang-undang No. 32/ 2004 tentang “pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional negara Republik Indonesia” dan pemberlakuan Undang-undang 33/ 2004 tentang “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan terarah agar pembangunan disetiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah propinsi memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah propinsi harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah tingkat satu tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987: 82). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) ternyata mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah. Ini dikarenakan sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa. Sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah, selain pola investasi dan perkembangan prasarana transportasi (Zaris, 1987: 86). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Jawa Tengah yang dikategorikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah ternyata memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama kurun waktu lama tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2008
(miliar rupiah)

Tahun	PDRB atas dasar harga berlaku	Pertumbuhan (%)	PDRB atas Dasar Harga Konstan	Pertumbuhan (%)
2004	193.435.	12,53	135.790.	5,13
2005	234.435.	21,12	143.051.	5,35
2006	281.997.	20,29	150.683.	5,33
2007*	312.429.	10,79	159.110.	5,59
2008**	364.895.	16,79	167.790.	5,46

Catatan/Note :

*Angka sementara/Preliminary figures

**Angka Sangat Sementara/ Very preliminary figures

Sumber : PDRB Nasional , BPS,2004-2008

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa kenaikan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 selama periode tersebut selalu mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2006 Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan sebesar 5,33 % naik menjadi 5,59 % pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 turun menjadi 5,46 %.

Dibandingkan dengan propinsi lain di pulau Jawa, nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah relatif lebih rendah. Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai PDRB Jawa

Tengah selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur, bahkan lebih rendah dari Jawa Barat meskipun telah dimekarkan menjadi Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Ini terlihat dalam Tabel 1.2, pada 2 tahun terakhir PDRB Jawa Tengah yang selalu mengalami kenaikan tetapi masih kalah di banding dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Angka tersebut cukup signifikan yaitu hampir 2 kali lipat dari PDRB Jawa Tengah. Sedangkan untuk D.I. Jogjakarta dan Banten PDRBnya masih kalah dengan PDRB Jawa Tengah.

Tabel 1.2 PDRB atas dasar Harga Konstan 2000
Provinsi di Pulau Jawa tahun 2007-2008
(miliar rupiah)

Provinsi	2007*	2008**
DKI Jakarta	332.971	353.539
Jawa Barat	274.180	290.171
Banten	65.047	68.831
Jawa Tengah	159.110	167.790
DIY	18.292	19.209
Jawa Timur	287.814	304.799

Catatan/Note :

*Angka sementara/Preliminary figures

**Angka Sangat Sementara/ Very preliminary figures

Sumber : PDRB Nasional , BPS,2004-2008

Perkembangan penerimaan daerah provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.3 dimana komposisi dan proporsi Pendapatan Asli Daerah yang digali oleh pemerintah daerah sudah mengalami peningkatan baik jumlah maupun proporsi pendapatan dari dari subsidi masih tetap naik, tetapi proporsinya terhadap total penerimaan sudah mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2004 PAD Jawa Tengah hanya Rp 2.883.599.876 (juta) dan mengalami kenaikan tiap tahunnya hingga pada tahun 2008 telah mencapai nilai Rp. 5.203.027.494 (juta). Ini menunjukkan bahwa penggalian dana oleh pemerintah daerah propinsi melalui sumber daya asli daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Meningkatnya PAD dan penurunan proporsi tingkat subsidi diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 1.3 Komposisi Penerimaan Daerah Jawa Tengah
Tahun 2004-2008
(juta rupiah)

Tahun	Sisa Tahun Lalu	PAD	Dana Perimbangan	Jumlah
2004	229.132.000	1.865.391.191	789.076.687	2.883.599.876
2005	229.063.000	2.490.643.743	807.132.658	3.526.839.401
2006	0	2.630.621.266	1.183.858.503	3.814.479.769
2007	11.364.864	2.947.863.606	1.419.342.557	4.378.571.027
2008	0	3.698.843.476	1.504.184.018	5.203.027.494

Sumber : Jawa Tengah dalam angka, BPS,2004-2008

Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah. Perkembangan investasi di Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Perkembangan Investasi Swasta di Provinsi Jawa Tengah

	Jumlah Proyek PMDN	Nilai Investasi PMDN (juta rupiah)	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMA (Ribu US \$)
2004	17	5.608.617,36	46	3.086.867,96
2005	78	5.756.775,87	127	550.512,44
2006	16	5.067.314,48	53	381.668,71
2007	15	1.191.875,23	82	317.165,10
2008	15	1.336.340,57	36	39.448,86

Sumber : Jawa Tengah dalam angka, BPS,2004-2008 dan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah

Nilai investasi di Jawa Tengah sangat fluktuatif. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2004. Dari 17 proyek penanaman modal dalam negeri yang ditanamkan oleh investor dalam negeri tersebut bernilai Rp 5.608.617,36 (juta). Sedangkan untuk penanaman modal asing nilainya sangat fantastis, yaitu mencapai 3.086.867,96 \$ (ribu) dengan total proyek mencapai 46 buah proyek. Walaupun mengalami jumlah kenaikan dari segi jumlah total proyek yang mencapai 78 buah proyek untuk PMDN tetapi nilainya cuma naik sedikit hanya mencapai Rp 5.756.775,87 (juta). Hal itu juga terjadi pada PMA, jumlah total proyek mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 127 buah proyek tetapi nilainya turun

sangat drastis dibandingkan dengan tahun 2004. Nilai investasi tahun 2005 untuk PMA hanya bernilai 550.512,44 \$ (ribu). Pada tahun 2006 terjadi penurunan jumlah proyek yg sangat drastis dari tahun 2005 baik PMDN maupun PMA dimana jumlah proyek PMDN pada 2006 hanya 16 tetapi nilai investasinya hanya mengalami penurunan sedikit daripada tahun 2005 menjadi Rp. 5.067.314,48 (juta), Sedangkan untuk PMA pada 2006 hanya 53 dengan total investasi sebesar 381.668,71 \$ (ribu). Total proyek dan nilai Investasi PMDN dan PMA mengalami penurunan terus menerus, pada tahun 2008 total proyek PMDN hanya 15 proyek dengan nilai Rp 1.336.340,57 (juta) sedangkan PMA hanya 36 proyek dengan nilai investasi sebesar 39.448,86 \$ (ribu).

Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja.

Tabel 1.5 Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah

(Jiwa)

Tahun	Bekerja	Pertumbuhan
2004	14.930.097	-
2005	15.655.303	4,86%
2006	15.210.931	-2,84%
2007	16.304.058	7,19%
2008	15.463.658	-5,15%

Sumber : Jawa Tengah dalam angka, BPS, 2004-2008 diolah

Pembangunan daerah diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Tabel 1.5 terlihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja dari ketahun ketahun selama 5 tahun cenderung fluktuatif dimana pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2006-2007 dimana jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 7,19 % dan pada tahun 2007-2008 mengalami penurunan sebesar 5,12%. Berdasarkan hal tersebut maka perlu pemberdayaan sumber-sumber daya daerah agar mampu menyerap jumlah tenaga kerja di jawa tengah.

Penggalan pendapatan daerah, peningkatan peran serta swasta dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal pembangunan daerah diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah. Pemerintah

daerah harus melaksanakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas (*bottom up*) agar pembangunan yang dilaksanakan daerah merupakan keinginan bersama dan sesuai dengan potensi yang ada agar kesinambungan pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tingkat investasi, pendapatan asli daerah dan tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Apabila nilai dari masing-masing variabel meningkat maka peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB. Apabila terjadi penurunan dari variabel-variabel tersebut penurunan juga terjadi terhadap PDRB, dari fenomena tersebut di atas maka perlu adanya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini yang melatarbelakangi penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang dapat dikemukakan masalah yang ingin disampaikan yaitu masih rendahnya pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dibandingkan propinsi lainnya oleh karena itu perlu diteliti pengaruh Faktor Investasi, PAD, Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah.

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh tingkat investasi, pendapatan asli daerah, dan tenaga kerja terhadap PDRB Jawa Tengah?
2. Seberapa besar pengaruh masing-masing variable tingkat investasi, pendapatan asli daerah, dan tenaga kerja terhadap PDRB Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh tingkat investasi, pendapatan asli daerah, dan tenaga kerja secara individual terhadap PDRB Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh variabel yaitu investasi, pendapatan asli daerah, dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap PDRB Jawa Tengah.

1.3.2 Manfaat Kegunaan Penelitian

- 1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi tingkat investasi, pendapatan asli daerah dan tenaga kerja terhadap PDRB Jawa Tengah.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijaksanaannya yang berkaitan dengan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini disusun sitematika penulisan skipsi sebanyak lima bab, adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan latar belakang penelitian yang terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sitematika skripsi.

Bab II Landasan Teori yang akan digunakan untuk melandasi hipotesis yang diajukan memuat definisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

ekonomi, model pertumbuhan ekonomi, PDRB, Pendapatan Asli Daerah, tingkat investasi dan tenaga kerjadan angkatan kerja di Jawa Tengah.

- Bab III Metode Penelitian yang meliputi analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan pengujian asumsi klasik.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai hasil penelitian, yaitu data yang diperoleh akan di tulis dan di analisis untuk membuktikan kebenaran hipotesis.
- Bab V Penutup yang memuat simpulan dan saran bagi pengembangan lebih lanjut hasil penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

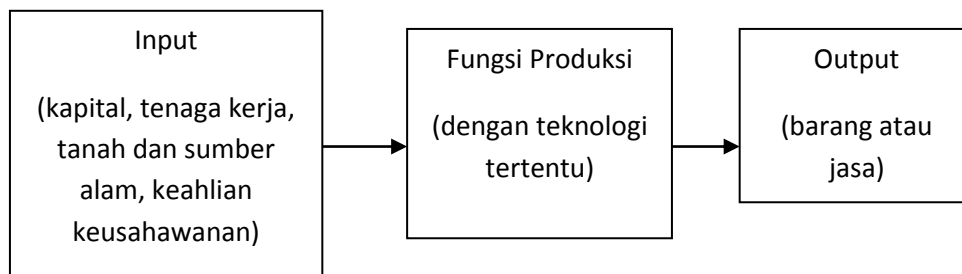
2.1. Landasan Teori

2.1.1. Fungsi Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Produksi dapat digambarkan sebagai berikut (Sugiarto *et al.* 2002):

Gambar 2.1.

Proses Produksi



Sumber : Sugiarto *et al.* (2002)

Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel yang menjelaskan (X) atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi fisik (output) dengan faktor-faktor produksi (input). Secara matematis fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut (Mubyarto, 1994):

$$Y = f (x_1, x_2, \dots, x_n) \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana :

Y = adalah hasil produksi (output)

x_1, \dots, x_n = faktor-faktor produksi (input)

Pengelolaan usahatani antara lain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pendapatan petani. Kedua tujuan tersebut merupakan faktor penentu bagi seorang petani untuk mengambil keputusan dalam usahatannya. Petani sebagai pengelola usahatani harus dapat mengalokasikan penggunaan faktor-faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja dan modal secara tepat. Oleh karena itu petani harus dapat mengkombinasikan faktor-faktor produksinya agar mendapatkan hasil yang optimum sehingga memperoleh pendapatan yang maksimum.

Kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi diusahakan sedemikian rupa agar dalam jumlah tertentu menghasilkan keuntungan tertinggi. Tindakan ini sangat berguna untuk memperkirakan tingkat keuntungan usahatani relatif terhadap sumberdaya yang tersedia.

Namun demikian, produksi pertanian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi dinyatakan bahwa semakin banyak faktor produksi yang digunakan maka semakin banyak pula produksi yang dihasilkan, akan tetapi dibatasi adanya satu

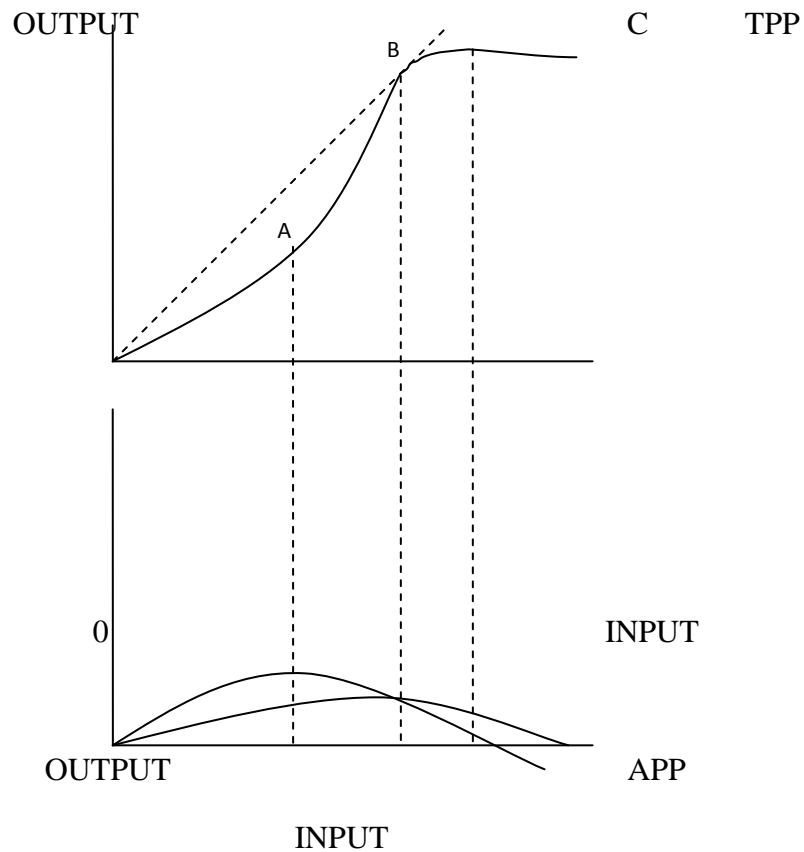
keadaan dari fungsi produksi yang disebut dengan “*The Law of Diminishing Return*”. Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam input ditambah penggunaannya sedang input-input yang lain tetap maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula akan naik, tetapi kemudian seterusnya menurun bila input tadi terus ditambah dan bisa menjadi negatif (Boediono, 2000).

Tambahan output yang dihasilkan dari penambahan 1 (satu) unit input variabel disebut *Marginal Physical Product* (MPP) dari input tersebut. Oleh sebab itu *The Law of Diminishing Return* sering pula disebut *The Law Diminishing Marginal Physical Product*.

Secara grafik penambahan faktor-faktor produksi yang digunakan dapat dijelaskan dengan gambar 2.2.

Gambar 2.2.

Grafik Produksi Dengan Satu Variabel Input



Sumber : Boediono (2000)

Kurva *Total Physical Product* (TPP) adalah kurva yang menunjukkan tingkat produksi total (Q) pada berbagai tingkat penggunaan input variabel (input-input lain dianggap tetap). $TPP = f(X)$ atau $Q = f(X)$. Kurva *Marginal Physical Product* (MPP) adalah kurva yang menunjukkan tambahan atau kenaikan dari TPP sedangkan

Average Physical Product (APP) adalah kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan input tersebut.

Hubungan antara ketiga kurva tersebut ditandai oleh :

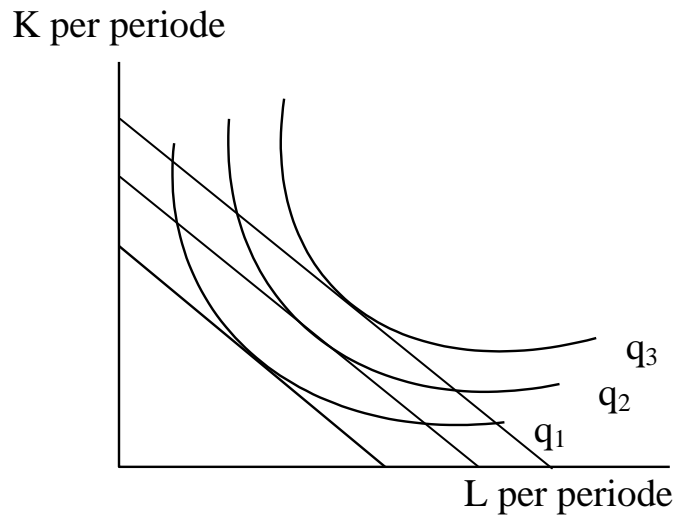
1. Penggunaan input X sampai pada tingkat dimana TPP cekung keatas (O sampai A), maka MPP menaik demikian pula APP.
2. Pada tingkat penggunaan X yang menghasilkan TPP yang naik dan cembung keatas (yaitu antara A dan C) MPP menurun.
3. Pada tingkat penggunaan X yang menghasilkan TPP yang menurun, maka MPP negatif.
4. Pada tingkat penggunaan X dimana garis singgung pada TPP persis melalui titik origin B, maka $MPP = APP$ maksimum.

2.1.2. Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Menurut Nicholson (1995), fungsi produksi dimana $\sigma = 1$ (elastisitas substitusi) disebut fungsi produksi Cobb-Douglas dan menyediakan bidang tengah yang menarik antara dua kasus ekstrim. Kurva produksi sama untuk kasus Cobb-Douglas memiliki bentuk cembung yang “normal”, seperti pada gambar 2.3.

Gambar 2.3

Peta Kurva Produksi Sama Untuk Fungsi Produksi dengan Nilai $\sigma = 1$



Sumber : Nicholson (1995)

Secara matematis dari fungsi produksi Cobb-Douglas, diketahui :

$$Q = f(K,L) = AK^aL^b \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana : Q = output

K = modal

L = tenaga kerja

A, a dan b merupakan konstanta dan koefisien positif.

Menurut Sudarsono (1990), fungsi produksi adalah suatu hubungan fungsional antara input dan output dalam suatu proses produksi. Dalam penelitian ini digunakan

fungsi produksi model Cobb-Douglas (C-D), dengan pertimbangan bahwa dengan model C-D ini relatif lebih mudah untuk melakukan analisis. Keuntungan lain dari penggunaan model fungsi produksi C-D ini yaitu elastisitas dari masing-masing faktor produksi dapat sekaligus diketahui dari koefisien masing-masing faktor produksi tersebut.

2.1.3 Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 1994: 10). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2000: 5). Menurut Zaris, (1987: 82) pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Samuelson (1995: 436) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/output dari suatu negara. Ada 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi :

a. Sumber daya manusia.

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut tersedianya manajemen, ketrampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik.

b. Sumber daya alam.

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.

c. Pembentukan modal.

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.

d. Perubahan teknologi dan inovasi.

Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perokonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswastawan yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, mengadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju (Samuelson, 1995: 436-439).

Menurut Sukirno, (1994: 415) bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan dari suatu perekonomian, sedangkan dalam analisis makro ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara. Menurut Boediono, (1992: 9) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi 3 aspek yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) suatu perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada 2 aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk.

3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu jangka panjang.

Dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang cukup lama (5 tahun) mengalami kenaikan output.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi berbeda dengan istilah pembangunan ekonomi. Menurut Suryana, (2000: 3) menerangkan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur yaitu :

- a. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
- b. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Sumitro Djojohadikusumo (Sanusi, 2004: 8), pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus.
- b. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
- d. Perbaiki sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem ini bisa di tinjau dari dua aspek yaitu : aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal) (Arsyad, 1999: 11-12).

2.1.4 Model pertumbuhan ekonomi

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah, benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Dan keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan di dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan mencakup sasaran seperti : *Pertama*, dalam usaha meratakan pembangunan di seluruh daerah, sekaligus untuk menghindari terjadinya jurang perbedaan tingkat pembangunan antar daerah yang semakin dalam. *Kedua*, pengarahannya dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat di daerah, baik bagi kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan

daerah sendiri. *Ketiga*, mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan (ekonomi) antar daerah yang kuat di dalam satu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh. *Keempat*, membina daerah-daerah minus, daerah perbatasan, dan tanah-tanah kritis, dengan program-program khusus (Sanusi, 1987: 120).

Pembangunan daerah juga diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Tujuan pembangunan yang pertama, untuk pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), peralatan (*man made resources*) dan sumber daya alam (*natural resources*) dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif. Dalam hal ini terdapat upaya memadukan kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan teknologi dalam rangka memperbesar produktifitas. Semakin tinggi tingkat kemampuan sumber daya manusia, besar kemungkinan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia guna mencapai pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan tujuan pembangunan yang kedua, yaitu pemerataan yang mempunyai implikasi dalam pencapaian tujuan yang ketiga supaya sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak. Sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi

persyaratan bahwa penggunaan sumber daya, baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Pada hakekatnya pertumbuhan suatu daerah dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi keduanya. Suatu pendekatan yang lazim digunakan untuk menjelaskan penentuan-penentuan internasional dari pertumbuhan regional adalah melalui penggunaan model-model ekonomi makro. Model-model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan output menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing dapat dianalisa secara sendiri-sendiri.

$$Q_n : f_n (K, L, LN, Tr, T, S_o)$$

Dimana :

Q_n : Output

K : Kapital

L : Labour

Ln : Land (tanah)

Tr : Transportasi

T : Teknologi

So : Sosial politik

Kalau dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah dikuantitaskan, maka rumus persamaan yang mencerminkan hubungan input output adalah menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas.

Notasi Cobb-Douglas yang terkenal, yang dapat ditulis dalam notasi Yule dengan cara sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_{1,2,3} X_{2i}^{\beta_{1,2,3}} X_{3i}^{\beta_{1,3,2}}$$

Persamaan ini bias dinyatakan dengan lebih enak dalam bentuk logaritma sebagai berikut :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_{1,2,3} \ln X_{2i} + \beta_{1,3,2} \ln X_{3i} + \mu_i$$

Dimana :

Y : Hasil (Output)

X2 : Masukan tenaga kerja

X3 : Masukan modal

$\beta_{1,2,3}$: koefisien masukan tenaga kerja

$\beta_{1,3,2}$: koefisien masukan modal

$\beta_0 : \text{Ln } \beta_{1,2,3}$

$\mu_i : \text{Residu (Gujarati, 1996 : 99)}$

Metode ini merupakan fungsi paling sederhana yang mencakup semua unsur penting dalam faktor produksi. Dengan menggunakan alat analisis ini dapat diketahui peranan masing-masing faktor produksi (*input*) terhadap nilai produksi yang dihasilkan (*output*).

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan. Ketiga cara tersebut adalah

1. Cara Pengeluaran.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

2. Cara Produksi atau cara produk netto.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau *value added* yang diciptakan.

3. Cara Pendapatan.

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. (Sukirno, 1994: 32).

Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB adalah :

1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya.
2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan

atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2003). Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Sutrisno (1984: 200) pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 6 Undang-undang tahun 2004 tentang pendapatan asli daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator) (Suparmoko, 2002: 135). Mardiasmo (1997: 51) mendefinisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut.

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Terdapat banyak batasan tentang pajak yang dikemukakan para ahli, tetapi pada dasarnya isinya hampir sama yaitu pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa imbalan jasa yang secara langsung dapat ditunjuk (Suparmoko, 1997: 277). Dari batasan atau definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

1. Iuran masyarakat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa balas jasa secara langsung
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Berdasarkan kewenangan memungutnya pajak digolongkan menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pengertian pajak daerah adalah sama dengan pajak negara, perbedaannya terletak pada :

- a. Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak)
- b. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah (Sutrisno, 1984: 203).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan

perundangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena seseorang atau badan hukum menggunakan jasa dan barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk (Sutrisno, 1984: 202). Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2002 tentang retribusi daerah pasal satu menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pada dasarnya retribusi adalah pajak, tetapi merupakan jenis pajak khusus, karena ciri-ciri dan atau syarat-syarat tertentu masih dapat dipenuhi (Sutrisno, 1984: 139). Syarat-syarat tertentu tersebut antara lain : berdasarkan undang-undang atau peraturan yang sederajat harus disetor ke kas negara atau daerah dan tidak dapat dipaksakan. Batasan pengertian retribusi ini sendiri merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah karena seseorang dan atau badan hukum menggunakan barang

dan jasa pemerintah yang langsung dapat ditunjuk. Dari definisi di atas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah

Lapangan retribusi daerah adalah seluruh lapangan pungutan yang diadakan untuk keperluan keuangan daerah sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh daerah.

3. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan perkataan lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya yaitu fungsi ekonomi (Kaho, 1998: 169). Pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah atas dasar berbagai pertimbangan : menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat; untuk melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami, seperti angkutan umum atau telepon; dalam rangka mengambil alih

perusahaan asing; untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah; dianggap cara yang “efisien” untuk menyediakan layanan masyarakat, dan/atau menebus biaya, serta untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah (Devas, 1989: 111).

Sumber pendapatan asli daerah yang ketiga yaitu adalah laba dari perusahaan daerah. Karena berbentuk perusahaan maka prinsip pengelolaannya berdasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan. Dengan demikian perusahaan harus mencari keuntungan dan selanjutnya sebagian dari keuntungan tersebut diserahkan ke kas daerah. Fungsi pokok dari perusahaan daerah adalah :

1. Sebagai dinamisator perekonomian daerah, yang berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah.
2. Sebagai penghasil pendapatan daerah yang berarti harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat diserahkan ke kas daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan mampu memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah. Sifat utama perusahaan daerah berorientasi pada keuntungan, dapat memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan kata lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya

yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Artinya pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonomi sebagai badan hukum yang bertujuan mendapatkan laba. Sedangkan lapangan hasil perusahaan daerah adalah sebagian dari perusahaan daerah yang bergerak di bidang produksi jasa dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Penerimaan Dinas-dinas dan Pendapatan Lain-lain yang disahkan

Penerimaan dinas-dinas merupakan penerimaan yang berasal dari usaha dinas-dinas daerah yang bersangkutan yang bukan merupakan penerimaan pajak, retribusi ataupun laba perusahaan daerah. Fungsi pokok dari penerimaan dinas-dinas daerah (kecuali dinas pendapatan daerah) pada umumnya adalah bukan mencari pendapatan daerah, tetapi melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah yang bersifat pembinaan atau bimbingan kepada masyarakat. Penerimaan lain-lain, di lain pihak adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah (Hirawan, 1987: 204).

Fungsi utama dari dinas-dinas daerah adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung dan ruginya, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan untuk bertindak sebagai organisasi ekonomi

yang memberikan pelayanan dengan imbalan jasa. Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik yang berupa materi dalam hal kegiatan bersifat bisnis, maupun non materi dalam hal kegiatan tersebut untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

Jadi di satu pihak dapat menghimpun dana sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di lain pihak lebih mengarah kepada publik service dan bersifat penyuluhan yaitu tidak mengambil keuntungan, melainkan hanya sekedar untuk menutup resiko biaya administrasi yang dikeluarkan.

2.1.7 Tingkat Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994: 107). Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-

undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Investasi atau pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dibedakan menjadi investasi perusahaan swasta, perubahan inventaris perusahaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi perusahaan merupakan komponen yang terbesar dari investasi dalam suatu negara. Pengeluaran investasi tersebut terutama meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lain dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh keuntungan di masa depan.

Harorld dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1999: 291).

2.1.8 Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. (Suparmoko, 2002: 114). Secara ringkas, tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Suparmoko (2002: 114) angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan (Simanjuntak, 1985: 3).

Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985: 3). Jika yang digunakan sebagai satuan hitung tenaga kerja adalah orang, maka disini dianggap bahwa semua orang mempunyai kemampuan dan produktifitas kerja yang sama dan lama waktu kerja yang dianggap sama. Penggunaan tenaga kerja hanya bisa diwujudkan kalau tersedia dua unsur pokok, yang pertama adalah adanya kesempatan kerja yang cukup banyak, yang produktif dan memberikan imbalan yang baik. Dan yang kedua, adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan semangat kerja yang cukup tinggi.

Kesempatan kerja dapat tercipta jika terjadi permintaan akan tenaga kerja di pasar kerja. Besarnya tenaga kerja dalam jangka pendek tergantung dari besarnya efektifitas permintaan untuk tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan substitusi antara tenaga kerja dan faktor produksi yang lain, elastisitas permintaan akan hasil produksi, dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lainnya. Dalam statistik ketenagakerjaan di Indonesia kesempatan kerja merupakan terjemahan bagi *employment* yang berarti sebagai jumlah orang yang bekerja tanpa memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang dimiliki tiap orang, pendapatan dan jam kerja mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Nasara, 1997 mengadakan penelitian dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia dengan menggunakan model persamaan :

$$\ln Y = \ln A + \beta \ln X_0 + \beta \ln X_1 + \beta \ln X_2 + \beta \ln X_3 + \mu$$

Dimana :

Y : PDRB

A : Konstanta

X₀ : Tenaga kerja

X₁ : Pembentukan modal

X2 : Kualitas sumber daya manusia

X3 : Aglomerasi

μ : Variabel pengganggu

Hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh penggunaan variabel demografi dalam model pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 propinsi di Indonesia adalah bahwa variabel pembentukan modal, tenaga kerja, mutu modal manusia dan aglomerasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB masing-masing daerah penelitian tersebut.

Wijayanti, 2002 mengadakan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sumbangan Pemerintah Pusat dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dengan menggunakan model persamaan :

$$\ln Q : \ln A + \alpha \ln L + \beta \ln K_0 + \gamma \ln K_1 + \mu$$

Dimana :

Q : PDRB

A : Konstanta

L : Tenaga Kerja

Ko : Sumbangan Pemerintah Pusat

K1 : Pendapatan Asli Daerah

α : Koefisien Tenaga Kerja

β : Koefisien Sumbangan Pemerintah Pusat

γ : Koefisien Pendapatan Asli Daerah

μ : Variabel Pengganggu

Subekti, 2004 mengadakan penelitian dengan judul Analisis Peran dan Dampak Utang Luar Negeri, PMA, PMDN, dan Tabungan pemerintah Terhadap PDB Indonesia dengan menggunakan metode penaksiran model yang digunakan adalah regresi berganda Ordinary Least Square (OLS) dengan spesifikasi model :

$$PDB : \beta_0 + \beta_1 AID + \beta_2 PMA + \beta_3 PMDN + \beta_4 TAB + \mu$$

Dimana :

PDB : Produk Domestik Bruto

AID : Utang Luar Negeri

PMA : Nilai realisasi Penanaman Modal Asing

PMDN : Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri

TAB : Tabungan Pemerintah

β_0 : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$: Koefisien regresi masing-masing variabel

μ : Variabel pengganggu

Model yang akan digunakan berdasarkan model Subekti yang disesuaikan untuk permodelan Provinsi Jawa Tengah. Untuk membedakan dengan penelitian yaitu menjadikan PMA dan PMDN menjadi satu variabel yaitu dalam variabel Investasi. Dan juga saya menambahkan variabel tenaga kerja

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam table 2.2 berikut

NO	Judul penelitian	Metodologi	Hasil
1	Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia iningsih, (Nasara 1997)	<p>Variabel yang digunakan :</p> $\text{Ln } Y = \text{Ln } A + \beta \text{ Ln } X_0 + \beta \text{ Ln } X_1 + \beta \text{ Ln } X_3 + \beta \text{ Ln } X_3 + \mu$ <p>Dimana :</p> <p>Y : PDRB</p> <p>A : Konstanta</p> <p>X₀ : Tenaga kerja</p> <p>X₁ : Pembentukan modal</p> <p>X₂ : Kualitas sumber daya manusia</p> <p>X₃ : Aglomerasi</p> <p>μ : Variabel pengganggu</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh penggunaan variabel demografi dalam model pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 propinsi di Indonesia adalah bahwa variabel pembentukan modal, tenaga kerja, mutu modal manusia dan aglomerasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB masing-masing daerah penelitian tersebut.</p>
2	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli	Variabel yang digunakan :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

<p>Daerah, Sumbangan Pemerintah Pusat dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus (Wijayanti, 2002)</p>	<p>$\ln Q : \ln A + \alpha \ln L + \beta \ln K_o + \gamma \ln K_1 + \mu$</p> <p>Dimana :</p> <p>Q : PDRB</p> <p>A : Konstanta</p> <p>L : Tenaga Kerja</p> <p>Ko : Sumbangan Pemerintah Pusat</p> <p>K1 : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>α : Koefisien Tenaga Kerja</p> <p>β : Koefisien Sumbangan Pemerintah Pusat</p> <p>γ : Koefisien Pendapatan Asli Daerah</p> <p>μ : Variabel Pengganggu</p>	<p>tenaga kerja mempengaruhi pengaruh yg positif terhadap Pertumbuhan ekonomi kabupaten kudu hal ini disebabkan karena tenaga kerja merupakan factor produksi sebagai penggerak perekonomian daerah.</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah menunjukkan bahwa variable jumlah transfer pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kudu. Dengan koefisien regresi sebesar (2,440) dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah transfer pemerintah pusat walaupun secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus</p>
<p>3 Analisis Peran dan Dampak Utang Luar Negeri, PMA, PMDN, dan Tabungan pemerintah Terhadap PDB Indonesia (Subekti 2004)</p>	<p>Model yang digunakan adalah regresi berganda Ordinary Least Square (OLS) dengan spesifikasi model :</p> <p>$PDB : \beta_0 + \beta_1 AID + \beta_2 PMA + \beta_3 PMDN + \beta_4$</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Utang Luar Negeri, PMA, PMDN dan Tabungan Pemerintah mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap PDB</p>

TAB + μ

Indonesia.

Dimana :

PDB : Produk Domestik Bruto

AID : Utang Luar Negeri

PMA : Nilai realisasi Penanaman Modal Asing

PMDN : Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri

TAB : Tabungan Pemerintah

β_0 : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$: Koefisien regresi masing-masing variabel

μ : Variabel pengganggu

Sumber : Penelitian Terdahulu Diolah

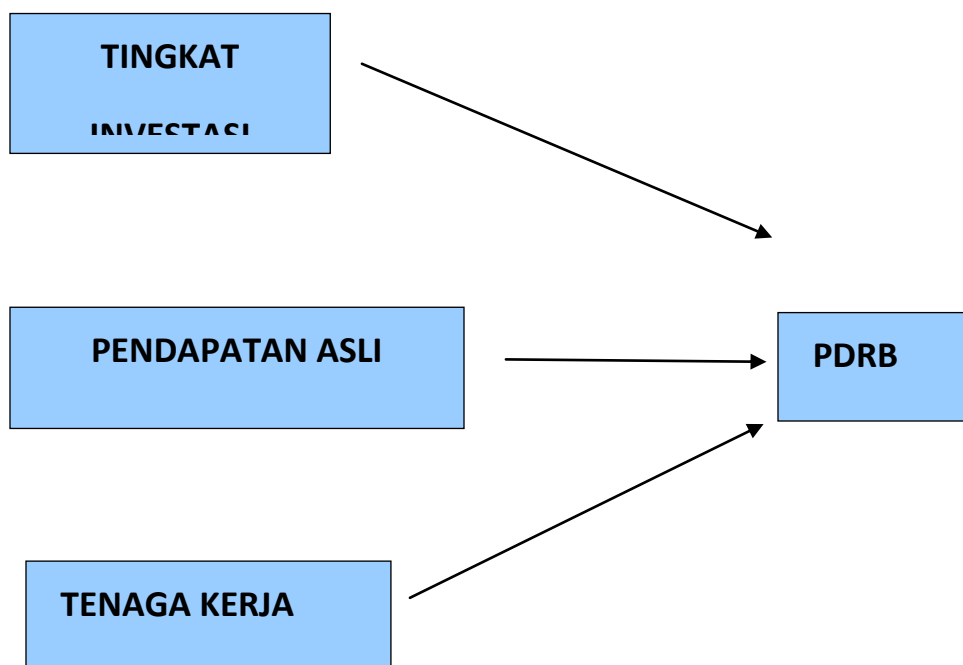
2.3 Kerangka Pemikiran

Secara ringkas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan titik tolak pemberdayaan pemerintah daerah secara lebih mandiri. Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal itu, Propinsi Jawa Tengah menggali dana dari investasi yang ada dan menggali potensi daerahnya. Untuk melihat pengaruh tingkat investasi, Pendapatan Asli Daerah dan tenaga kerja terhadap Pertumbuhan ekonomi (PDRB) maka digunakan analisis regresi berganda.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana daripada pembangunan di daerah tersebut, sehingga dapat memajukan daerah tersebut. Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah tersebut. Dengan demikian tingkat investasi, pendapatan asli daerah dan tenaga kerja dapat dijadikan indikator dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Model yang akan digunakan berdasarkan model Subekti yang disesuaikan untuk permodelan Provinsi Jawa Tengah. Untuk membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu menjadikan PMA dan PMDN menjadi satu variabel yaitu dalam variabel Investasi dan juga saya menambahkan variabel tenaga kerja dan juga membuang variable utang luar negeri dan tabungan pemerintah.

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil ujian ini akan dapat dipakai sebagai masukan dalam

menentukan kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Sesuai dengan masalah di atas dapat diambil hipotesa sebagai berikut :

- a. Diduga Tingkat investasi, pendapatan asli daerah dan tenaga kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.
- b. Diduga Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.
- c. Diduga Tingkat Investasi mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap PDRB..
- d. Diduga Tenaga Kerja mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap PDRB.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari segi pendekatan dibagi menjadi dua macam yaitu, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2001: 5).

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu gejala yang bervariasi. Variabel juga dapat diartikan sebagai obyek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian dari suatu penelitian (Arikunto: 1998: 99). Variabel dalam penelitian ini antara lain :

3.2.1 Variabel Bebas (*Independent Variables*)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui (Azwar, 2001: 62). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan yang merupakan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil laba perusahaan milik daerah dan juga pendapatan lainnya daerah yang sah. PAD adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno, 1984: 200). Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 tahun 2004, PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, dan penerimaan dinas dan pendapatan lain-lain yang disahkan (Diukur dalam satuan juta Rupiah).

b. Tingkat Investasi

Tingkat investasi merupakan jumlah uang yang ditanamkan untuk pembangunan industri atau proyek-proyek Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Diukur dalam satuan Juta Rupiah) (Sukirno, 1994: 107).

c. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai dengan 64 tahun (Suparmoko, 2002: 114). Mulyadi Subri (2002: 57), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Di ukur dalam satuan orang).

3.2.2 Variabel terikat/tergantung (*Dependent Variables*)

Variabel tergantung adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel yang lain. Besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain termasuk (Azwar, 2001: 62).

Variabel terikat atau tergantung dalam penelitian ini adalah PDRB. PDRB yaitu jumlah nilai produksi netto dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun yg diukur dalam juta rupiah).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* periode tahun 1990-2008. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2001: 91).

Data yang digunakan meliputi : data PDRB, data tingkat investasi, data pendapatan asli daerah, dan data tenaga kerja. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. Dalam metode statistika alat analisis yang biasa di pakai dalam khasanah penelitian adalah analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung pada variabel yang lain yang di sebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variabel yang di ketahui (Gujarati, 1996: 13-14). Penelitian ini akan menggunakan persamaan regresi linear berganda dan di transformasikan dalam bentuk logaritma dengan menggunakan kuadrat terkecil dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y=f(x_1^{\beta_1}, x_2^{\beta_2}, x_3^{\beta_3}) + \mu_i \dots\dots\dots (3.1)$$

Kemudian persamaan diatas di transformasikan kedalam bentuk Logaritma natural menjadi :

$$\ln Y = \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \mu_i \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana :

$\ln Y$: PDRB

$\ln X_1$: Pendapatan Asli Daerah

$\ln X_2$: Tingkat Investasi

$\ln X_3$: Tenaga Kerja

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien masing-masing variabel

α : konstanta

μ_i : Residu

Alasan Penggunaan Logaritma Natural dalam Penelitian ini adalah:

1. Untuk Menghilangkan Heterokodesitas
2. Untuk memudahkan pembacaan parameter/koeffisien regresi sebagai elastisitas

Untuk menguji kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variable

dependen, beberapa ukuran yg bisa digunakan adalah:

1. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi memberikan panduan kebaikan model dengan menjelaskan seberapa besar perubahan dari variable dependen yg bisa dijelaskan oleh perubahan dalam variable independen .
2. Kesalahan standart estimasi. Nilai ini memberikan panduan tentang kesalahan dari model dalam memprediksi y dengan variable x. Semakin kecil kesalahan standar estimasi, semakin baik model memprediksi.
3. Koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial adalah koefisien antar variable independen secara sendiri-sendiri dengan variable dependen. Jika pada korelasi berganda kita melihat hubungan antara variable independen secara bersama-sama dengan variable dependen, maka pada korelasi parsial kita menganalisis hubungan dari variable independen secara individual dengan variable dependen.

3.5 Pengujian Hipotesis

Uji statistik terhadap regresi berganda. Untuk membuktikan hipotesa ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan atau kuat maka dilakukan dengan uji t dan uji F.

1. Pengujian arti keseluruhan regresi (Uji F)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen perlu dilakukan pengujian koefisien regresi secara serempak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan derajat signifikansi nilai F. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Eviews 6.

Ho = PAD, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Hi = PAD, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB. Dasar pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso (2004: 112) :

- a. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ (α) maka Ho diterima.
- b. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ (α) maka Ho ditolak dan menerima Hi.

2. Pengujian koefisien regresi parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh variable bebas secara parsial atau individu terhadap variable tidak bebas dengan asumsi variabel yang lain konstan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variable bebas menggunakan Eviews 4.1

Ho = PAD tidak berpengaruh terhadap PDRB.

H1 = PAD berpengaruh terhadap PDRB

Ho = Tingkat Investasi Tidak berpengaruh terhadap PDRB

H2 = Tingkat Investasi berpengaruh terhadap PDRB

Ho = Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap PDRB

H3 = Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB

Dasar pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso (2004: 168) :

c. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ (α) maka Ho diterima.

d. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ (α) maka Ho ditolak dan menerima Hi.

3. Koefisien Determinasi.

Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen) Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dilihat dari besarnya determinasi parsial (r^2) (Algifari, 2000: 58).

3.6 Pengujian penyimpangan Asumsi Klasik

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari :

3.6.1 Uji Normalitas

Salah satu asumsi dalam penerapan OLS (*Ordinary Least Square*) dalam regresi linier klasik adalah distribusi probabilitas dari gangguan U_t memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan memiliki varian yang konstan. Untuk menguji apakah distribusi data normal dilakukan dengan uji *Jarque Bera* atau *J-B test*.

$$J - B \text{ hitung} = \left[\frac{S^2}{6} + \left(\frac{K - 3}{24} \right)^2 \right] \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana :

S = Skewness statistik

K = Kurtosis

Jika nilai $J - B \text{ hitung} > J-B \text{ tabel}$, atau bisa dilihat dari nilai probability *Obs*R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual U_t terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu kuadran dimana satu atau lebih variabel dependennya dapat menyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Dan bertujuan untuk menguji apakah model kegresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel Ortoground adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Multikol dapat dilihat juga dari tolerance and variance inflation faktor (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (estimator) meningkat seandainya ada multikolinieritas dalam suatu model empiris. Misalkan nilai R^2 dari hasil estimasi regresi secara parsial mendekati 1, maka nilai VIF akan mempunyai nilai tak terhingga. Dengan demikian, bila kolineritas meningkat, maka varian dari penaksir akan meningkat dalam limit yang tak terhingga. VIF dirumuskan sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{(1 - r_{x_1 x_2}^2)} \dots\dots\dots (3.3)$$

Sebagaimana rute of thumb dari VIF, jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0.09, maka suatu variabel dikatakan berkolerasi sangat tinggi. (gujarati, 2003).

Dan nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritan adalah nilai tolerance <0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ dan hasil perhitungan VIF tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. (Ghozali, 2005).

3.6.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi (*autocorrelation*) adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya (Wing Wahyu Winarno, 2009). Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antarobjek (*cross section*).

Autokorelasi terjadi karena beberapa sebab. Menurut Gujarati (2003), beberapa penyebab autokorelasi adalah :

- a) Data mengandung pergerakan naik turun secara musiman
- b) Kekeliruan memanipulasi data
- c) Data yang dianalisis tidak bersifat stasioner.

Dalam penelitian ini menggunakan *Uji Breusch-Godfrey* (BG). Nama lainnya adalah *Uji Lagrange-Multiplier* (Pengganda Lagrange).

Dimana konsekuensi dari adanya autokorelasi ini adalah (Gujarati, 1995) :

1. Penaksiran tidak efisien, selang keyakinan menjadi lebar secara tidak perlu dan pengujian signifikasinya kurang akurat.
2. Varian residual menaksir terlalu rendah.
3. Pengujian t dan f tidak sah sehingga memberi kesimpulan yang menyesatkan mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Breusch – Godfrey (BG Test) (Gujarati, 1995) :

Pengujian dengan BG Test dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu U_i dengan model autoregressive dengan orde ρ sebagai berikut :

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \varepsilon_t \quad (3.4)$$

Dengan H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 \dots \rho_p = 0$, dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual apabila X^2 tabel, atau bisa dilihat dari nilai probability *Obs*R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model dapat ditolak.

3.6.4 Uji heterokedastisitas

Salah satu penting dalam regresi linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam regresi populasi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan memiliki varians yang sama atau varian setiap gangguan yang dibatasi untuk nilai tertentu mengenai pada variabel-variabel independen berbentuk nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Dan jika suatu populasi yang dianalisis memiliki gangguan yang variansnya tidak sama maka mengindikasikan terjadinya kasus heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji Glejser. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat (U_t^2) dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung X^2 , dimana $X^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 1995 :379). Dimana pengujiannya adalah jika X^2 -hitung $<$ X^2 -tabel, atau bisa dilihat dari nilai probability *Obs*R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.